

**Efektivitas Standar Pelayanan Minimal  
Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

*The Effectiveness Of Minimum Service Standards  
At The Regional Education Office Of The North Sulawesi Province*

**Jureine Valentin Debora Kalele<sup>(1)(\*)</sup>, Femmy Tasik<sup>(2)</sup>, Evelin Kawung<sup>(2)</sup>**

1) Staf dan Peneliti pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: jureinekalele@gmail.com

---

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id	: Selasa, 07 Maret 2023
Disetujui diterbitkan	: Senin, 29 Mei 2023

---

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out more deeply how the effectiveness of Minimum Service Standards at the Regional Education Office of North Sulawesi Province. The research was conducted from March to August 2022. The selection of respondents was done intentionally. This research uses descriptive qualitative research design. Research informants used purposive sampling technique. The research focuses on the accuracy of program targets, program socialization, achievement of program objectives, and program monitoring. Data collection technique was carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Minimum Service Standards program has not run effectively and optimally. This is because this program does not run to the entire community and the process for verification with data control is not strict so that people still do not choose education facilitation from the government. In addition, the socialization process by the Regional Education Office of North Sulawesi Province did not reach the community, only to school administrators in the regions. The lack of control and supervision to influence the level of achievement of the fulfillment of students in each school in the region. There is no direct assistance from the field responsible for continuing to schools, especially those that are still included in remote areas so that this program does not show satisfactory results.*

*Keywords : effectiveness; minimum service standard; education*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana efektivitas standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2022. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian adalah ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program standar pelayanan minimal ini belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini karena program ini tidak berjalan kepada seluruh masyarakat dan proses untuk verifikasi dengan control data tidak ketat sehingga masyarakat masih belum memilih fasilitas pendidikan dari pemerintah. Selain itu proses sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak sampai ke masyarakat, hanya kepada pengurus sekolah-sekolah yang ada di daerah. Minimnya kontrol dan pengawasan untuk mempengaruhi tingkat capaian pemenuhan peserta didik disetiap sekolah yang ada di daerah. Tidak ada pendampingan langsung dari bidang yang bertanggung jawab berkelanjutan kepada sekolah apalagi yang masih termasuk daerah terpencil sehingga program ini tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Kata kunci : efektivitas; standar pelayanan minimal; pendidikan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan juga dalam pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelolah potensi daerahnya bersama masyarakat. Standar pelayanan minimal sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang merupakan urusan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan melihat letak negara kita yaitu Indonesia yang adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk Indonesia adalah Nusantara. Dengan wilayah yang sangat besar tentu membutuhkan sistim pemerintahan yang kuat dan hebat untuk mengelola dan mengembangkan seluruh masyarakat.

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah kemajuan dalam segala bidang. Disini bisa dibuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunan dirinya melalui pendidikan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas Indonesia dapat memiliki modal masa depan yang hebat lewat anak-anak bangsa yang menempuh pendidikan.

Berangkat dari dasar pondasi sumber daya manusia yang kokoh dan tepat, dapat diwujudkan cita-cita mulia suatu bangsa dalam berbagai bidang kehidupan yang menjadi modal suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan merupakan landasar perkembangan ekonomi dan sosial

masyarakat. Pendidikan disini ialah berperan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kualitas kemampuan masyarakat yang artinya merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Pendidikan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat dan suatu bangsa. Pendidikan ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin merata dan terbuka bagi setiap orang. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama sebagai tanggung jawab negara. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia itu sendiri.

Pembangunan ekonomi suatu negara yang kuat disebabkan oleh kualitasnya sumber daya manusia negara tersebut. Sumber daya manusia berkualitas merupakan hasil bermutunya suatu proses didikan. Dalam hal ini suatu kualitas tersebut dapat bersaing di era global dan memberikan bukti terhadap pembaunan suatu negara (Fattah, 2004).

Pemerintah Indonesia dalam membangun pendidikan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 hasil amandemen yang keempat menyatakan “warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanda memungut biaya.

Ketika keinginan pemerintah Indonesia agar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengeluarkan kebijakan peningkatan mutu layanan sitem di Indonesia, yang salah satunya lewat program standar pelayanan minimal disetiap daerah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta sampai

pemerintah desa. Maka pemerintah Indonesia menerbitkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Standar pelayanan minimal merupakan tahap awal implementasi standar nasional pendidikan yang mencakup delapan standar secara nasional yang disebut standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 dinyatakan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pengelolaan sekolah;
5. Standar pembiayaan;
6. Standar penilaian pendidikan.

Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dasar yang mencakup beberapa kebutuhan pendidikan seperti standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan standar isi, proses, penilaian, pengelolaan, standar kompetensi dan pembiayaan pendidikan. Beberapa dari seluruh target sekolah belum mampumenuhi standar pelayanan minimal, hal ini tercermin dengan masih adanya sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Disini setiap daerah menyusun perencanaan program atau kegiatan untuk mengukur sejauh mana kinerja layanan pendidikan dasar yang berkualitas di daerah masing-masing.

Daerah masing-masing melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan pendidikan yang berpedoman kepada indikator dalam standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Hasil analisis standar pelayanan minimal digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan. Standar pelayanan minimal juga merupakan langkah awal untuk menentukan mutu sebuah lembaga pendidikan dasar bagi pemerintah

daerah. Dengan penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, tidak ada bangunan sekolah yang berlantai tanah, tersedia buku teks bagi setiap siswa dan tidak ada perbedaan kurikulum serta kekurangan lain yang mengakibatkan tidak bermutu layanan pendidikan.

Lembaga pendidikan yang memiliki kualitas tinggi merupakan keinginan setiap pelaku pendidikan, baik itu sebagai peserta didik, sebagai pendidik atau pengajar, serta tenaga kependidikan. Selain itu hal ini juga menjadi dambaan oleh masyarakat secara luas, seperti orang tua maupun para pengguna pendidikan atau pihak yang memperhatikan kualitas dan kuantitas output sekolah, yang menggunakan jasa pendidikan yang telah dihasilkan lembaga pendidikan berkualitas.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, agar pendidikan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat dan tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan langkah peningkatan layanan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, seperti penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan peserta didik. Visi pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ialah terselenggaranya layanan pendidikan mewujudkan masyarakat cerdas komprehensif yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Misi pendidikan Provinsi Sulawesi Utara:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan untuk semua;
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan untuk semua;
3. Meningkatkan kualitas mutu dan relevansi menuju layanan beberapa sekolah bertaraf internasional;
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan untuk semua;

5. Meningkatkan kepastian memperoleh semua layanan pendidikan untuk semua.

Serta memiliki motto dari pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ialah *Pengabdian kami adalah masa depan anak cucu kami.*

Maka ini menjadi dasar dari pemerintah Indonesia dalam program standar pelayanan minimal yang memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, yaitu: pertama, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk pelayanan dasar, kedua, bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan target yang ada, bisa dilihat masih ada beberapa yang belum capai pemenuhan indikator standar pelayanan minimal. Inilah yang menyebabkan penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana efektivitasnya capaian penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan meneliti lebih dalam bagaimana efektivitas standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat secara detail dapat dijabarkan:

1. Bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengelolaan sumberdaya pembangunan.
2. Bagi praktisi dapat dijadikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat khususnya dalam melihat program pemerintah lewat standar pelayanan minimal. Serta menjadi referensi bagi peneliti lain sehingga perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan

sumberdaya pembangunan tidak statis. Kiranya juga dapat menjadi bahan pustaka untuk mengembangkan program pascasarjana program studi pengelolaan sumberdaya pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret Sampai Agustus tahun 2022, dilakukan pada Dinas Pendidikan Sulawesi Utara pada Sub Bagian Tata Urusan Pemerintahan.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, adalah metode penelitian kualitatif naturalistic yang prosesnya bersifat induktif, data yang diperoleh adalah data yang masih perlu diberi interpretasi sehingga dapat dipahami maknanya (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif disebut metode baru karena pada tahun 1985 metode ini mulai digunakan. Pendekatan penelitian ini dipilih karena penelitiannya dilakukan pada kondisi natural atau menggambarkan keadaan yang sesungguhnya ada dan terjadi dari keluarga atau masyarakat. Pendekatan kualitatif bisa terlihat serta mengetahui capaian dalam menerapkan fasilitas yang diprogramkan pemerintah dan yang sudah disediakan langsung oleh pemerintah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga semua itu dapat terlihat sampai ke masyarakat, terawat dan bisa tertata dengan baik atau tidak. Bisa dikatakan bahwa standar pelayanan minimal ini dapat memenuhi setiap fungsinya atau tidak.

### **Jenis Sumber Data**

1. Sumber data primer, adalah unsur yang diperlukan untuk mendapatkan informasi terkait situasi dan kondisi demi kebutuhan

yaitu pada pemerintahan daerah sebagai wakil pemerintah pusat yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengawas dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelaksana bidang pendidikan dan semua yang disebutkan merupakan unsur urusan wajib dalam tata pemerintahan standar pelayanan minimal.

2. Sumber data sekunder, data ini didapatkan dari orang lain selain sumber primer, dapat menjadikan buku-buku atau jurnal yang di dalamnya menjelaskan tentang pencapaian hasil penerapan pada standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada efektivitas standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melihat empat indikator menurut Budiani (2007):

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi ialah dengan pengamatan dan lebih muda menggali data dari informan. Observasi dilakukan dengan secara langsung terhadap objek atau berada bersama dalam lingkungan kehidupan dari objek pengamatan. Dengan demikian peneliti memang benar-benar mengalami secara langsung dan bisa melakukan pengamatan langsung. Pada akhirnya dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui tingkat makna setiap perilaku yang nampak.
2. Interview, Esterberg (2002) mendefinisikan bahwa interviu adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Cara ini untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden tentang keadaan situasi dan berbagai fenomena yang terjadi. Ini adalah metode wawancara yang prosesnya memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan yang akan diwawancarai, sehingga bisa mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangannya.
3. Dokumentasi, ialah mencari bahan atau hal yang bersangkutan dengan variabel berupa catatan ataupun agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis, maka setiap bahan dari itu menjadi pegangan atau bukti yang penting. bila ada bukti seperti dokumen, dan hasil penelitian ini di dukung contohnya berupa foto ataupun rekaman, data hasil penelitian akan dikatakan lebih akurat.

4. Triangulasi, Stainback (1988) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam melalui triangulasi Patton (1980) juga mengemukakan bahwa akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2017).

### **Teknik Analisis Data**

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (Sugiyono 2017) menyatakan bahwa proses analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dilakukan dengan memilih data dari data yang ada paling dibutuhkan dan penting untuk dianalisa kemudian membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung secara terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Namun, penelitian ini berfokus pada analisis data penelitian kualitatif yang mana proses penelitian dimulai dari sejak peneliti berada di lapangan sampai pada pengumpulan data.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data berdasar pada kondisi yang sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

#### **1. Data Collection**

Mengumpulkan data yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data dicakup triangulasi.

#### **2. Data Reduction**

Data yang diperoleh di rangkum dan memilah hal-hal yang pokok serta memfokuskan diri sesuai dengan tema dan pola penelitian.

#### **3. Data Display**

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks naratif.

#### **4. Conclusion Drawing/ Verification**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Ketepatan Sasaran Program**

1. Banyak sekolah yang masih belum menerapkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Peserta didik yang tidak sesuai zonasi lingkungan sekolah, bisa dikatakan masih belum mengikuti jalur fasilitas pemerintah.
3. Masih ada sekolah yang belum mencapai kuota dalam 1 rombongan belajar atau bisa dikatakan kurangnya siswa dalam sekolah.
4. Prioritas peserta didik masih lebih memandang sekolah yang banyak di kenal atau bisa dikatakan menjadi pusat perhatian karena banyak prestasi.
5. Masih ada sekolah yang jumlah tenaga pendidiknya belum seimbang dengan jumlah peserta didiknya, banyak peserta didik yang berasal dari keluarga dibawah rata-rata berusaha sekolah di sekolah negeri, namun tenaga pendidik disana hanya bisa di tugaskan disana atau hanya mendapatkan tugas penempatan didaerah tersebut.

#### **Sosialisasi Program**

1. Proses dalam sosialisasi program standar pelayanan minimal telah berjalan dengan

baik, maksimal dan secara merata setiap tahunnya pada organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Masih banyak masyarakat belum mengikuti seperti apa dan bagaimana proses program standar pelayanan minimal ini.

### **Pencapaian Tujuan Program**

1. Dalam hasil evaluasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa sudah sebanyak 567 sekolah se-Povinsi Sulawesi Utara terlayani yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu Kota Manado 111 sekolah, Kota Tomohon 23 sekolah, Kota Bitung 44 sekolah, Kabupaten Minahasa 74 sekolah, Kabupaten Minahasa Utara 50 sekolah, Kabupaten Minahasa Selatan 48 sekolah, Kabupaten Minahasa Tenggara 30 sekolah, Kota Kotamobagu 21 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow 47 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 50 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 16 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 12 sekolah, Kabupaten Kepulauan Sangihe 32 sekolah, Kabupaten Kepulauan Talaud 34 sekolah dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 15 sekolah.
2. Sekolah-sekolah negeri pinggiran atau pelosok kabupaten dan kota masih belum merata jumlah siswa maupun jumlah tenaga pendidiknya.
3. Fasilitas zonasi lingkungan sekolah bagi peserta didik atau masyarakat dekat dengan tempat sekolah masih tidak maksimal pelaksanaannya.

### **Pemantauan Program**

1. Warga negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai peserta didik memperoleh fasilitas tenaga pendidik dan ruang kelas, sehingga bisa menimba ilmu

tersebut sampai lulus dan mendapatkan ijazah.

2. Setiap triwulan selalu melaksanakan laporan evaluasi tingkat kabupaten dan kota, berkelanjutan provinsi sampai pemerintah pusat.
3. Adanya pendampingan pemerintah lewat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam realisasi program standar pelayanan minimal ini.

### **Pembahasan**

#### **Ketepatan Sasaran Program**

Budiani (2007) mengatakan ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sasaran program merupakan target spesifik dan hasil yang akan dicapai dari suatu program yang direncanakan secara matang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa program ini sebagai alat pemerintah daerah untuk menjamin kases dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Terkait dengan hal tersebut Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang sudah diperbaharui 2 kali. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat dan terjangkau memang diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya.

Implementasi di lapangan bahwa ketepatan sasaran program ditemui masih ada masyarakat yang tidak memakai fasilitas yang telah disediakan, dan masih memilih sekolah yang agak jauh tetapi sangat populer atau banyak dikenal dengan prestasi yang ada.

### **Sosialisasi Program**

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program terdapat empat indikator, salah satunya sosialisasi program. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program yang dalam melakukan sosialisasi program tersampaikan sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat terealisasi pada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Program standar pelayanan minimal ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan kegiatan sosialisasi standar pelayanan minimal pada tiap tahunnya dengan mengundang utusan unsur bidang standar pelayanan minimal, termasuk didalamnya unsur bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sosialisasi dilakukan agar menyesuaikan dengan pejabat atau staf yang pindah atau memiliki pejabat ataupun staf baru. Dalam kegiatan sosialisasi ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara juga mengundang untuk menjadi narasumber dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang ialah unsur pelaksana langsung dalam unsur standar pelayanan minimal dan program pemerintahan lainnya. Harapannya untuk mencapai pembangunan pendidikan yang memerlukan tahapan, program serta upaya yang terencana, terarah dan sistematis. Dan dalam kegiatan ini pun melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan evaluasi dan monitoring dalam upaya penanganan setiap pelaporan untuk setiap unsur bidang standar pelayanan minimal yang termasuk didalamnya ialah unsur bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### **Pencapaian Tujuan Program**

Pencapaian tujuan program menurut Budiani (2007) yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan

tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Program Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Dengan melihat hasil evaluasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa sudah ada 567 sekolah se-Povinsi Sulawesi Utara terlayani yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu Kota Manado 111 sekolah, Kota Tomohon 23 sekolah, Kota Bitung 44 sekolah, Kabupaten Minahasa 74 sekolah, Kabupaten Minahasa Utara 50 sekolah, Kabupaten Minahasa Selatan 48 sekolah, Kabupaten Minahasa Tenggara 30 sekolah, Kota Kotamobagu 21 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow 47 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 50 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 16 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 12 sekolah, Kabupaten Kepulauan Sangihe 32 sekolah, Kabupaten Kepulauan Talaud 34 sekolah dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 15 sekolah.

Berdasarkan hasilnya bahwa ditemukan juga sekarang sekolah-sekolah negeri di pinggiran atau pelosok kabupaten dan kota masih tidak merata dalam jumlah siswa atau jumlah tenaga pendidik. Demikian juga dalam fasilitas zonasi lingkungan sekolah bagi peserta didik atau masyarakat dekat tempat sekolah tidak maksimal dilakukan.

### **Pemantauan Program**

Indikator keempat ini untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu pemantauan program. Menurut Budiani (2007) bahwa pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program terlaksana, dan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Program standar pelayanan minimal difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia. Penerima pelayanan



dasar pendidikan menengah dan pendidikan khusus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan peserta didik yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun.

Mutu pelayanan dasar merupakan ukuran dari kualitas pemenuhan minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai standar kelayakan hidup. Program dipantau mencakup kualitas jasa tenaga pendidik, kualitas jumlah jasa tenaga pendidik, standar jumlah peserta didik, kualitas bangunan peserta didik dan kualitas pemerataan layanan pendidikan di setiap sekolah. Semua ini berpengaruh dengan standar kompetensi sekolah, sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi setiap sekolah, pengelolaan pembiayaan setiap sekolah dan terukur dalam standar penilaian Pendidikan.

Hasil wawancara kepada informan, program standar pelayanan minimal hanya berlaku kepada sebagian masyarakat karena faktor keinginan dan sekolah favorit serta kurangnya minat peserta didik. Bedanya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tergantung orang tua memfasilitasi. Demikian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pendaftarannya peserta didik melihat peluang dan lingkungan yang kebanyakan mengambil paket kesetaraan Paket B dan Paket C dengan kendala putus sekolah karena ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan mengenai efektivitas standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program:

1. Ketepatan sasaran program bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2022 dan implementasinya dilapangan, ditemui ketidaksesuaian antara aturan yang ada dan peserta penerima manfaat program standar pelayanan minimal. Seharusnya pada proses pendaftaran peserta didik dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan yang ada dengan melihat kuota dan mempertimbangkan alamat peserta didik.

2. Sosialisasi program, standar pelayanan minimal telah dilakukan dari pemerintah pusat yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ke seluruh provinsi di Indonesia termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kemudian melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mensosialisasikan kepada dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian disampaikan ke sekolah-sekolah melalui kepala cabang Dinas Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah dilakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, namun pendaftar atau masyarakat sendiri kurang paham untuk mentaati fasilitas yang telah disediakan pemerintah melalui program standar pelayanan minimal.
3. Pencapaian tujuan program, bahwa belum sesuai dengan harapan. Kecenderungan utama masyarakat atau calon peserta didik memilih sekolah adalah karena keinginan sendiri, demikian fasilitas sekolah dan minat yang ada belum sama rata dengan sekolah ditempat lainnya. Menyebabkan calon peserta didik kurangnya minat memilih sekolah didaerah sendiri. Walaupun kurikulum diberikan pemerataan tetapi fasilitas yang masih berbeda.
4. Pemantauan program, bahwa belum merta serta belum ada pendampingan ketat dari pemerintah untuk setiap sekolah memenuhi capaian yang sempurna. Pendampingan pemerintah ke sekolah-sekolah yang disebut sebagai

penyelenggara program standar pelayanan minimal ini selalu diberikan himbauan dan aturan yang sudah disosialisasikan. Namun karena minat dan fasilitas tidak seimbang menyebabkan belum berjalan secara efektif.

### Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan untuk penyempurnaan efektivitas standar pelayanan minimal Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Ketepatan sasaran program, perlu adanya proses verifikasi data pendaftar atau calon peserta didik yang akurat agar ketepatan sasaran terpenuhi. Verifikasi sebaiknya dilakukan dari tingkat dinas kabupaten atau kota dari sekolah tersebut terhadap kesesuaian data. Selain itu, perlu tindakan pemerintah melakukan pemerataan fasilitas dan minat agar di daerah tertentu juga menjadi sekolah segudang prestasi sehingga pendaftar atau calon peserta didik bisa mengembangkan minat diri.
2. Sosialisasi program, sebaiknya sosialisasi program standar pelayanan minimal sampai juga kepada calon pendaftar atau masyarakat umum yang mempunyai anak calon peserta didik agar dapat diketahui bahwa sebenarnya kurikulum pendidikan sudah diberikan merata seluruh Indonesia, selain itu juga dapat mendorong menaikkan kualitas fasilitas pendidikan.
3. Pencapaian program, dalam hal pencapaian tujuan program, sebaiknya harus dilakukan pengawasan yang ketat setiap triwulan agar ketika saat pendaftaran atau penentuan minat dari pemerintah bisa melihat perkembangan program standar pelayanan minimal ini telah terfasilitasi dengan baik dan secara merata.
4. Pemantauan program, dari pemerintah khususnya pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus memberikan pengawasan berkelanjutan

agar setiap program efektif dan maksimal. Contohnya pengawasan pengawas sekolah tentang fasilitas dan keadaan sekolah, sehingga terpantau dan terealisasi dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N.W. 2007. Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan sosial input*, 2(1), 49-57.
- Esterberg, 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: McGraw Hill.
- Fattah, N. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis a Sources of New Methods*, Sage Publications, Inc., Beverly Hills.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito.
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative evaluation methods*.
- Stainback, S.B. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Reston, VA: Council for Exceptional Children; Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.